

Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas

Islamic Malay Identity Politics as an Effort to Realize a Culture of Integrity

Hasse Jubba^{1*}, Muh Rafi², Zuly Qodir³

^{1,3}Politik Islam-Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia

² Magister Ilmu Pemerintahan - Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: hasse@umy.ac.id

Diterima: 6 Februari 2021; Direvisi: 26 Februari 2021; Disetujui: 1 Maret 2021

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana identitas Melayu Riau dikonstruksikan dalam upaya mewujudkan budaya melayu yang berintegritas. Melalui observasi dan studi kepustakaan serta studi dokumentasi ditemukan beberapa upaya yang mendukung keberlangsungan identitas Melayu di tengah berbagai tantangan saat ini. Analisis artikel ini disandarkan pada data yang diperoleh dari kebijakan mengenai upaya mempertahankan budaya Melayu. Demikian pula, dilakukan wawancara untuk mengetahui sikap masyarakat mengenai dinamika budaya Melayu saat ini. Selain itu, data juga diperoleh dari naskah Gurindam Dua Belas yang hingga saat ini masih diperpegangi oleh masyarakat Melayu. Artikel ini menegaskan bahwa tiga hal terkait dengan identitas Melayu Riau. Pertama, identitas Melayu dipertahankan melalui berbagai upaya, termasuk legitimasi kultural melalui kerjasama antara Lembaga Adat Melayu (LAM) dengan pemerintah daerah. Kedua, terdapat stigma terhadap identitas Melayu yang direspons dengan upaya membangkitkan kembali identitas secara utuh melalui berbagai simbol. Ketiga, identitas Melayu senantiasa diidentikkan dengan Islam sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ia tidak saja merupakan identitas kultural, tetapi juga agama. Ketiga hal tersebut, dalam perspektif teoretis dikenal dengan konstruksi identitas yang mencakup identitas legitimasi, resisten, dan proyek. Artikel ini merekomendasikan perlunya dilakukan berbagai kajian mengenai identitas lokal di Indonesia untuk dijadikan dasar pembangunan secara lebih luas sehingga tidak terjadi gesekan antara nilai-nilai lokal dengan semangat pembangunan yang lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai modernitas.

Kata Kunci: Politik identitas, konstruksi, budaya Melayu, modernisasi

ABSTRACT

This article aims to explain how the Riau Malay identity is constructed to establish an integrity Malay culture. Observation, literature study, and documentary studies data showed several efforts to support the Malay culture's

continuity among various challenges faced. This article emphasizes three things related to the Riau Malay identity. First, the Malay identity is maintained through various efforts, including cultural legitimacy through cooperation between LAM and local governments. Second, the stigma on Malay identity is responded to revive the Malay identity holistically through various symbols. Third, Malay identity is always identified with Islam to show that it is a cultural identity and a religious (Islam) identity. In a theoretical perspective, these three things are known as the construction of identity, which includes legitimacy, resistance, and project identities. This article recommends the need for various studies on Indonesia's local identities as a basis for the development of Indonesia in general. It is required to avoid conflict between local values and the spirit of development, which tends to adopt modernity values.

Keywords: Political identity, construction, Malay culture, modernism

PENDAHULUAN

Pemekaran daerah dapat dilihat sebagai salah satu bentuk politik identitas karena juga mengusung isu ketimpangan baik ekonomi, politik maupun sosial (Abdullah, 2017; Erman, 2018). Era Reformasi menjadi masa di mana penguatan identitas kedaerahan kembali menguat setelah terhegemoni di masa Orde Baru. Tekanan budaya dan politik oleh pemerintah Orde Baru telah menyebabkan melemahnya komunitas-komunitas khususnya Melayu. Situasi ini tercipta karena pemerintah Orde Baru melakukan homogenisasi budaya yang berkontribusi pada Jawanisasi, identitas melayu terkikis sampai reformasi datang (Alfarabi et al. 2019). Menguatnya identitas kedaerahan (lokal) pada prinsipnya membawa atmosfir baru pada perubahan-perubahan strategi sebuah identitas. Bahkan, identitas kesukuan misalnya, dijadikan alat politik dalam rangka menunjukkan eksistensi budaya pada satu sisi, dan menunjukkan perjuangan di sisi lain. Politik identitas pada dasarnya bukanlah hal baru karena memiliki akar kuat khususnya di Indonesia (Fautanu, et al, 2020).

Keberlangsungan budaya Melayu merupakan tantangan besar, karena meskipun masih kuat, posisinya saat ini kurang strategis dan pengaruhnya mulai menurun (Abdullah, 2017). Reformasi telah memungkinkan penduduk Riau Melayu untuk terus menunjukkan kehadiran mereka di daerah mereka sendiri (Alfarabi et al. 2019; Alfarabi, 2019; Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri

Syafirah, 2019). Etnik Melayu sebagai sebuah komunitas, memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan format politik Melayu, bukanlah komunitas yang merupakan bagian dari sistem politik berbasis ideologi kerajaan yang cenderung otoriter (Jaya, 2019). Penolakan Presiden Soeharto terhadap hasil pemilihan Gubernur Riau tahun 1985 yang memenangkan seorang putra pribumi menjadi sebuah monumen yang selalu dikenang karena sikap otoriter Orde Baru yang telah menyangkal kehendak mayoritas rakyat Riau (Rozi, 2018). Malaysia dan Indonesia, saat ini terlihat kurang memahami latar belakang sejarah kedua negara. Sebagian besar tantangan sosial dan korporasi baru-baru ini lahir dari kebingungan budaya, sehingga kekhawatiran kecil pun akan menyebabkan kebakaran dan nyala api yang tidak cepat padam (Zed, 2015). Dalam arti modernitas, peradaban Melayu, yang telah menetapkan warisannya, akan menjadi lebih canggih dan pada saat yang sama dapat mendominasi peradaban besar dunia jika ia dapat mengubah sesuatu dari dominasi menjadi budaya hegemonik (Sanusi, 2017). Orang-orang Melayu ingin warisan mereka dilindungi oleh kebijakan pemerintah daerah dan tidak digunakan untuk politik praktis (Asrinaldi, 2018).

Kajian mengenai Melayu telah banyak dilakukan oleh para ahli dengan melihat dari berbagai aspeknya seperti aspek sejarah (Ahmad, 1979; Nordin, 2017; Putra, 2016) yang melihat bagaimana Melayu eksis dan menjadi embrio bangsa Indonesia. Kajian lain melihat Melayu dalam hubungannya dengan Islam (Abd Rani, 2005; Mashitah Sulaiman, 2013; Stapa & Shahrudin, Noranizah Yusuf, 2012; Tamuri & Jasmi, 2009; Zakaria, 2012). Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa Melayu adalah bagian penting dari Islam sehingga terjadi pengidentikan keduanya dan berlangsung sampai saat ini. Kajian lain mengenai Melayu melihat dari sisi diaspora (Abdullah & Abdul Fattah, 2013; Samin, 2015; Sanusi, 2017). Kajian-kajian ini menempatkan Melayu tidak saja sebagai etnis yang menjadi cikal-bakal bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai budaya yang banyak memiliki hubungan dengan berbagai wilayah khususnya di Asia Tenggara. Hanya saja, kajian-kajian tersebut belum melihat bagaimana

budaya Melayu dikonstruksikan sebagai sebuah identitas yang menghadapi ancaman di era modern ini. Kajian ini dititik-beratkan pada upaya apa yang dapat dilakukan dalam mewujudkan budaya Melayu yang berintegritas di tengah berbagai pengaruh luar yang sangat masif saat ini.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana budaya Melayu dikonstruksikan termasuk bagaimana dipertahankan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan. *Pertama*, bagaimana identitas Melayu dilegitimasi sebagai sebuah budaya yang eksis dengan sejumlah tantangannya. *Kedua*, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh internal Melayu dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman saat ini. *Ketiga*, upaya seperti apa yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi identitas/budaya Melayu di era modern ini. Artikel ini disandarkan pada asumsi bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan identitas Melayu baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, identitas Melayu dipertahankan melalui upaya pemerintah daerah bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu (LAM). Secara kultural, pembangunan situs Melayu dengan simbol-simbolnya menjadi cara yang dilakukan sejauh ini. Pemeliharaan ujaran bijak Melayu melalui penyampaian bait-bait seperti dalam Gurindam Duabelas merupakan media yang mampu membangkitkan kembali memori masyarakat Melayu mengenai identitasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang bersifat deskriptif-eksploratif. Peneliti berangkat dari upaya untuk mendeskripsikan sekaligus mengeksplorasi gagasan tentang politik identitas Melayu Riau yang selama ini mengalami degradasi. Data yang dijadikan landasan analisis diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan studi literatur. Observasi dilakukan terhadap simbol-simbol budaya Melayu Riau yang hingga saat ini masih dapat ditemukan. Simbol-simbol kultural Melayu dapat dilihat pada bangunan seperti rumah tempat tinggal, perkantoran, bahkan rumah ibadah. Wawancara

yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan kondisi yang dialami budaya Melayu secara umum saat ini. Informan dipilih berdasarkan kedalaman pengetahuan mengenai budaya Melayu sehingga memberikan informasi yang dapat dijadikan landasan analisis.

Studi dokumen difokuskan pada dokumen-dokumen budaya Melayu berupa foto, gambar, dan peta yang selama ini masih banyak disimpan oleh para penggiat budaya. Dokumen lain yang dikaji adalah Gurindam Dua Belas, karya Raja Ali Haji yang digolongkan ke dalam puisi lama Melayu yang berisi tunjuk ajar dan pesan moral untuk membentuk budi pekerti manusia menjadi insan yang beragama, yang berisi tentang petuah-petuah kehidupan yang hingga kini masih diwariskan kepada generasi muda dengan segala kendalanya. Dari berbagai dokumen yang diperoleh, ditemukan bahwa identitas Melayu pada dasarnya tidak mengalami perubahan secara format atau bentuk, tetapi mengalami pergeseran pada aspek pemaknaan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan budaya itu sendiri. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para ahli sebelumnya, baik yang berbentuk publikasi buku maupun artikel jurnal. Data yang diperoleh dari ketiga sumber ini terlebih dahulu dikelompokkan untuk memudahkan kecocokan data. Pada tahap berikutnya, penulis memberikan konteks atau penafsiran terhadap data yang ada dan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Politik Identitas

Politik identitas adalah sebuah gaya politik yang berusaha melawan marginalisasi kelompok dengan menganut sebuah rasa identitas bersama yang positif dan asertif (Heywood, 2014). Politik identitas juga terkait dengan cara untuk memberikan garis yang tegas dalam menentukan siapa saja yang termasuk anggota kelompok dan siapa saja yang bukan bagian dari kelompoknya (Morowitz dalam Prayetno (2016). Mengingat garis-garis

demarkasi tersebut tidak dapat diubah, maka status keanggotaan tampak bersifat permanen. Menjadikan identitas etnis sebagai komoditas politik merupakan langkah mempengaruhi pihak lain agar dapat memenuhi keinginannya. Politik identitas menekankan pada adanya upaya untuk menjadikan perbedaan sebagai label diri atau kelompok, termasuk pada etnis di Indonesia. Upaya ini penting dilakukan dalam rangka mencari jalan mempertahankan identitas dan keberlangsungan kelompok. Terkait dengan ini, persoalan penggunaan identitas untuk kepentingan lain bukanlah hal baru. Sebab, identitas merupakan sumber makna yang utama sehingga apa yang dilakukan seseorang berlandaskan pada apa yang diyakini (Hemay & Munandar, 2015; Salim, 2015).

Politik identitas, yang sering kali hadir pada bagian dari sejarah Indonesia kontemporer, harus diperlakukan dan dipertahankan dengan hati-hati oleh logika kontekstual yang ditafsirkan secara akurat dan cerdas (Habibi, 2017). Sentimen kesukuan hanya dapat memiliki efek positif bila dihadapkan dengan citra figur, yang berarti bahwa seseorang akan mendukung seorang kandidat, apapun sukunya. Ini dapat pula dikatakan bahwa kontribusi masing-masing faktor dapat bersifat negatif atau positif (Hemay & Munandar, 2015). Munculnya pengaruh etnis sebagai kekuatan politik perlahan-lahan mengubah kontrol negara dan kelas birokrat yang berkuasa (Salim, 2015). *Selembayung*, sebagai karakteristik identitas Melayu, sebenarnya bergerak lebih bebas di antara kelompok penggunanya sehingga keseragaman dan pengucilan tidak berhasil (Salam, 2017). Munculnya politik identitas digunakan untuk mengubah struktur sosial, politik dan ekonomi yang tidak mendukung kehidupan kelompok etnis Melayu (Venus, Syafirah, & Salam, 2019).

Proses tradisi intelektual Islam Melayu tidak dapat dipisahkan dari proses transmisi dan penyebaran ajaran dan gagasan Islam (Reid, 2001), yang selalu melibatkan semacam "jaringan intelektual" antara para ulama dan para intelektual secara keseluruhan (Ris'an Rusli, 2018). Sejauh menyangkut aspek politik, masalah regionalisme atau pendapat utama dalam kehidupan

masyarakat sangat jelas menciptakan struktur untuk operasionalisasi politik identitas dan dapat dilihat dalam banyak kondisi yang muncul dalam budaya meskipun dibuktikan oleh adanya benturan-benturan (Ulum, Jannah, & Arifullah, 2017). Dalam konteks ini, identitas dipolitisasi oleh interpretasi ekstrim dan membutuhkan dukungan dari orang-orang yang merasakan sama, baik dalam gender, kebangsaan, kepercayaan atau komponen lainnya (A. Abdullah, 2017; Syu'ib, 2017).

Studi ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Manuel Castells dalam melihat sebuah fenomena seperti halnya identitas Melayu Riau. Menurut Castells dalam Salim (2015), terdapat tiga proses pembentukan dalam membangun sebuah identitas. *Pertama*, identitas legitimasi (*legitimizing identity*) adalah citra lembaga yang mengatur masyarakat yang merasionalisasi dan mempertahankan hegemoni atas aktor sosial, seperti lembaga negara yang berupaya meningkatkan identitas nasional anggota masyarakat. Bahkan, organisasi telah memperoleh kredibilitas untuk melakukannya. *Kedua*, identitas resisten (*resistance identity*), yakni sebuah siklus pembentukan identitas oleh anggota sosial yang berada di bawah tekanan karena dominasi dan persepsi negatif oleh pihak lain untuk membentuk oposisi dan penciptaan identitas yang berbeda dari mereka yang memerintah, dengan pandangan terhadap keberadaan suatu komunitas. *Ketiga*, identitas proyek (*project identity*) merupakan sebuah identitas dimana anggota budaya membentuk identitas baru yang dapat menentukan posisi barunya tersebut dalam masyarakat dan mengubah struktur masyarakat secara keseluruhan. Ketiga proses tersebut merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh kelompok dalam rangka mempertahankan diri khususnya identitas yang mengalami ancaman.

Melayu sebagai Identitas Bersama

Studi-studi terdahulu memberikan kerangka awal bahwa budaya Melayu sangat penting bagi masyarakat Riau. Identitas kultural seperti halnya Melayu pernah mengalami kondisi terpuruk ketika rezim otoriter berkuasa.

Ekspresi kultural masyarakat hampir seragam, mengikuti keinginan penguasa kala itu. Simbol-simbol kultural seperti ornamen pakaian, rumah adat, bahasa dan identitas lainnya mengalami peminggiran. Di era Reformasi, identitas Melayu Riau kembali menguat dengan segala prosesnya. Penciptaan identitas juga mencerminkan nilai-nilai yang dicari oleh budaya Melayu (Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri Syafirah, 2019). Salah satu daerah yang secara terbuka berupaya membangkitkan identitasnya adalah Melayu Riau. Provinsi Riau merupakan wilayah yang berkarakter Melayu kuat dan masih memiliki ikatan yang kuat dengan Melayu di tempat-tempat lain seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan, pemerintah daerah Riau menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara melalui visinya pada tahun 2020 (Affandi, 2018; Syu'ib, 2017). Hingga saat ini, pemerintah provinsi Riau berupaya untuk mempertahankan dan menumbuh-kembangkan budaya Melayu sebagai identitas bersama masyarakat Riau di tengah keberadaan etnis lain seperti yang tergambar pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Etnis Yang Ada di Provinsi Riau

No	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	2.103.659	37,74%
2	Jawa	1.431.598	25,05%
3	Minang	672.621	11,26%
4	Batak	400.837	7,31%
5	Banjar	191.787	3,78%
6	Bugis	139.26	2,27%
7	Sunda	103.012	1,6%
8	Tionghoa	188.897	3,72%
	Jumlah	5.726.241	100%

Sumber: Dokumentasi LAM Riau 2019.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki berbagai macam etnis suku, namun masih didominasi oleh Melayu. Komposisi etnis yang pada prinsipnya didominasi oleh “pendatang” menjadi salah satu ancaman identitas Melayu. Hal ini diakui oleh salah seorang akademisi di Pekanbaru Riau, DM (32). Ia mengungkapkan adanya ancaman terhadap budaya Melayu secara umum.

“iya karena keberadaan masyarakat suku asli Melayu sudah sangat terpinggirkan, karena banyaknya pendatang dari daerah-daerah yang juga membawa adat dan kebiasaan dari daerah mereka, bahkan untuk kota Pekanbaru sendiri bahasa sehari-hari adalah

bahasa Minang atau mayoritas berbahasa Minang” (Wawancara, Oktober 2020).

Hal yang sama diungkapkan oleh EZ (33), bahwa:

“Identitas Melayu menghadapi ancaman kepunahan pada era globalisasi ini, dikarenakan banyaknya pengaruh dari dunia luar, sebagai contoh baju yang dikenakan anak muda saat ini jauh dari identitas budaya Melayu itu sendiri” (Wawancara, Oktober 2020).

Pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kesadaran sekaligus kekhawatiran atas keberadaan eksistensi identitas Melayu. Mereka bahkan melihat keberadaan etnis pendatang menjadi salah satu potensi ancaman karena membawa identitas lokalnya ke Riau. Pertemuan beberapa budaya melahirkan budaya baru yang pada prinsipnya mengurangi “kadar” identitas budaya asal.

Pada era Reformasi, elit politik pemerintah provinsi Riau mulai mencoba untuk memperkuat dan menunjukkan identitas mereka yang sebenarnya, dan berbagai wacana dibentuk melalui kebijakan dan disebarluaskan untuk menggambarkan identitas Melayu di Riau (Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri Syafirah, 2019). LAM didedikasikan untuk melindungi dan memelihara warisan simbol Melayu dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi Visi Misi Riau 2020. Jenis kerjasama lembaga ini dengan Pemerintah dapat dilihat dalam konservasi budaya daerah seperti yang termaktub pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 tahun 2012 dalam Bab IX Pasal 11, LAM Riau yang pada intinya berperan dalam hal (1) inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya serta aset kekayaan, (2) inventarisasi artefak berupa peninggalan bersejarah, dan (3) menyusun rencana kegiatan menyangkut pengelolaan dan pengembangan adat/tradisi Melayu. Kolaborasi antara LAM Riau dan pemerintah daerah merupakan suatu identitas legitimasi yang terlihat dalam proses pembuatan kebijakan, selain itu, LAM Riau telah memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan, dalam penyusunan Peraturan Daerah, LAM Riau telah terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah, khususnya peraturan daerah mengenai warisan atau praktik-praktik masyarakat melayu Riau (Syu'ib,

2017).

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan budaya Melayu sebagai identitas bersama (kolektif) masyarakat Riau, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan No. 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau di mana pada bab V Pasal 6 menyebutkan tentang tujuan LAM Riau. Lembaga adat ini bertujuan untuk (1) menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu, (2) melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat, dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau, dan (3) mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerjasama dalam memperkuat budaya Melayu yang tidak saja terbatas pada kebudayaan yang bersifat *soft*, tetapi juga yang bersifat *hard*.

Sebagai implemementasi dari peraturan daerah tersebut, berbagai diskusi dilakukan untuk menemukan titik temu tentang bagaimana mengangkat identitas Melayu agar tidak hanya dikenal sebagai identitas, tetapi juga dikenal sebagai bagian dari budaya bangsa yang memiliki kontribusi besar terhadap berdirinya bangsa Indonesia. Salah satu kegiatan yang terlaksana atas kerjasama LAM dengan pemerintah daerah adalah pekan adat Melayu yang dilakukan rutin setiap tahun. Pada kegiatan ini, berbagai perhelatan kesenian dilakukan untuk menunjukkan kepada publik mengenai keberadaan Melayu di zaman dahulu yang memiliki sejumlah media hiburan. Dalam pekan adat Melayu juga disajikan kembali makanan-makanan khas yang selama ini sudah mulai hilang dalam masyarakat. Salah seorang warga Riau, MG (43) mengakui adanya ancaman terhadap identitas Melayu, termasuk potensi kepunahan. Ia juga sangat mengapresiasi adanya kegiatan kebudayaan seperti pekan adat di Riau. Ia mengatakan:

“Pekan adat sangat penting untuk generasi saat ini. Kami saat ini sulit menemukan ciri khas Melayu. Yang kami peroleh adalah

cerita-cerita tanpa dapat ditemukan bentuknya. Pekan adat memberikan pengetahuan kepada generasi muda mengenai budayanya sehingga mereka nanti bisa melestarikannya” (Wawancara, September 2020).

Pengakuan yang sama juga diperoleh dari MJ (52), seorang akademisi yang telah lama meninggalkan tanah Melayu, namun masih sering kembali ke daerah asalnya. Ia mengungkapkan:

“Ketika saya masih kecil, banyak sekali kegiatan budaya yang dilaksanakan khususnya ketika menjelang peringatan 17 Agustus. Setiap kampung ada kegiatan budaya yang isinya tentang tarian, cerita dan olahraga. Saat ini sulit menemukannya sehingga budaya atau identitas Melayu bisa hilang di masa yang akan datang. Bagi saya, identitas Melayu tidak bisa bertahan begitu saja, harus ada upaya bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga budaya Melayu secara bersama-sama” (Wawancara, September 2021).

Mengenai ancaman identitas Melayu, TH (35) mengakui adanya potensi atau gangguan terhadap keberadaan budaya Melayu. Ia mengatakan:

“Identitas Melayu mengalami degradasi karena tergerus arus global dan masuknya identitas-identitas lain dalam wilayah orang Melayu. Identitas Melayu belum mengarah kekepunahan, tetapi gerusan arus global tadi berdampak pada menipisnya pemahaman orang Riau terhadap identitas Melayu. Ketidaksungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu sebagai salah satu faktor yang menyebabkan penipisan identitas ini, tradisi-tradisi melayu hanya ditampilkan dalam seremoni-seremoni pemerintah tetapi tidak mengakar dalam kehidupan orang Riau. Perda muatan lokal nyatanya belum mampu menjawab penipisan identitas orang Melayu itu” (Wawancara, Desember 2020).

Pernyataan informan tersebut pada dasarnya menyadari adanya perubahan atau pergeseran kebudayaan di internal masyarakat Melayu saat ini. Pengaruh zaman sangat tampak mempengaruhi keberadaan budaya Melayu khususnya identitasnya, baik yang berupa makanan, pakaian, bangunan, dan bahkan adat-istiadat. Pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya kekhawatiran atas ancaman terhadap kepunahan budaya Melayu di masa yang akan datang. Mereka juga sadar bahwa identitas Melayu bukanlah sesuatu yang bisa menjaga dirinya sendiri sehingga perlu melibatkan semua

pihak. Adapun Gambar 1 di atas memberikan penjelasan atas adanya upaya bersama dalam menjaga eksistensi identitas Melayu. Kegiatan-kegiatan seperti pekan adat merupakan cara yang dapat mendukung keberlangsungan identitas Melayu dan semakin dikenal oleh masyarakat Melayu serta masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya memperkenalkan identitas Melayu tidak saja dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan adat, tetapi juga perlu didukung oleh adanya komitmen menjadikan identitas Melayu sebagai identitas yang dapat diterima secara luas. Pada konteks ini, identitas Melayu memperoleh legitimasi tidak saja dari masyarakat penganutnya, tetapi juga publik sehingga memperoleh ruang untuk dipertahankan secara bersama-sama.

Identitas sebagai Media Perlawanan

Seperti yang telah disinggung di awal, terdapat stigma mengenai masyarakat Melayu di masa lalu yang dianggap sebagai “pemalas”. Anggapan tersebut direspons oleh masyarakat Riau dengan upaya-upaya positif. Tiap-tiap etnik tentu saja ingin menampilkan citra positif yang bahkan lebih baik daripada etnis lain. Kelompok etnis dengan identitas negatif mencoba yang terbaik untuk menghapus stereotip negatif sehingga citra etnis dapat ditingkatkan. Situasi yang sama dilakukan oleh Orang Melayu Riau pasca Reformasi yang berusaha keras mengubah pandangan negatif kepada etniknya. Salah satunya dengan meluruskan stigma yang melekat dalam karakter Orang Melayu Riau. Wacana ini dilakukan karena di masa lalu terdapat pandangan negatif yang dialamatkan pada masyarakat Melayu yaitu ‘Melayu itu pemalas dan bukan orang yang pekerja keras’. Stigma Melayu sebagai “pemalas” dan “bodoh” (Hanafiah dan Yaacob, 2020; Arifin, 2012) misalnya, menjadi kondisi dimana identitas digunakan untuk menghakimi kelompok sosial tertentu. Hal ini kemudian menimbulkan pandangan yang negatif terhadap identitas Melayu. Paradigma “melayunisasi” merupakan salah satu upaya untuk mengubah citra ini dengan melakukan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat Melayu. Konsep melayunisasi

ditampilkan pada *selembayung* di gedung pemerintah daerah dan lembaga adat yang ada di Riau (Venus et al., 2019).

Stigma di atas memberikan ruang atas terjadinya ketegangan antar etnis sehingga membutuhkan upaya klarifikasi secara bijak. Masyarakat Melayu menyikapi hal tersebut bukan dengan berbagai ungkapan/bahasa. Masyarakat Melayu memang dikenal dengan kepiawaian menyusun bait ungkapan yang memiliki makna yang dalam. Pesan-pesan yang tersimpan di balik setiap bait mencerminkan ketatnya pesan moral (agama) yang disampaikan dengan harapan terwujud kehidupan yang lebih baik berlandaskan nilai-nilai moral. Bahasa Melayu dapat dipahami dalam tiga sudut pandang, yaitu filosofis, praktis, dan politis. *Pertama*, secara filosofis, penggunaan bahasa Melayu (termasuk dialeknya) memiliki kandungan makna tersendiri. Identitas kemelayuan di Riau dapat dilihat, salah satunya, dari sudut pandang ini. Secara filosofis, Bahasa Melayu merupakan akibat dari keinginan dan pilihan orang Melayu atas Islam sebagai pilihan keyakinannya. Keduanya pun tidak bisa dipisahkan karena telah terinternalisasi dalam kehidupan dan praktik keseharian mereka. Dalam sejarahnya, kehadiran Islam berdampak pada seluruh budaya bangsa Melayu, termasuk penggunaan bahasa. Petuah-petuah atau ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua Belas misalnya, memuat ujaran bagi masyarakat mengenai apa yang seharusnya dilakukan khususnya dalam bersikap dan bertingkah-laku sesuai dengan adat Melayu dan hal tersebut sangat islami. Dalam Gurindam Dua Belas yang memuat dua belas pasal misalnya ditemukan petuah atau ujaran luhur ini.

*Jika hendak mengenal orang yang berbangsa
Lihat kepada budi dan bahasa
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia
sangat memeliharakan yang tidak sia-sia
Jika hendak mengenal orang mulia
Lihatlah kepada kelakuan dia
Jika hendak mengenal orang yang berilmu
Bertanya dan belajar tidaklah jemu
Jika hendak mengenal orang yang berakal*

*Di dalam dunia mengambil bekal
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
Lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai*

Bait Gurindam di atas, memberikan ajaran tentang seorang dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai adat istiadat Budaya Melayu. Ajaran tersebut adalah dalam berbangsa atau bersuku atau berkelompok atau berorganisasi seseorang harus memiliki budi dan bahasa yang baik. Budi dan bahasa yang baik sudah dicontohkan dalam agama dan adat istiadat. Apalagi adat istiadat Budaya Melayu, nilai adat istiadat diambil dari nilai-nilai agama (Zainuri, 2017). Secara filosofis, dalam Bahasa Melayu termaktub nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti mulia yang dapat dirasakan dari kelembutan dialek bahasanya.

Kedua, tentang bahasa Melayu dilihat dari praktis atau penggunaan kata. Bahasa mana pun sarat dengan makna dan simbol. Demikian pula dengan Bahasa Melayu, penuh dengan simbol-simbol. Pada frasa-frasa dalam Bahasa Melayu sering tidak bersifat direktif atas apa yang dikatakan, tetapi merujuk pada perumpamaan-perumpamaan sehingga membutuhkan kepekaan yang tinggi bagi pengguna dan pendengarnya. Simbolisme di Melayu terkait dengan disposisi yang tenang dan keragaman perasaan dalam budaya Melayu, yang mencegah konflik. Pada banyak frasa, sangat jelas bagaimana Bahasa ini menjunjung tinggi perasaan seseorang (lawan bicara). Pada salah satu bait Gurindam Dua Belas sebagaimana yang kutip oleh Tenas Effendy (2013) tentang anjuran untuk bekerja dalam amanah disebutkan:

*Apabila bekerja memegang amanah,
Orang percaya menjauhkan fitnah
Apabila bekerja tiada lalai
Hasilnya tidak akan terbangkalai*

Bait di atas menegaskan bahwa amanah merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah pekerjaan. Bahkan, sangat ditekankan bagi siapa saja untuk bekerja dalam bingkai kejujuran yang tinggi. Sebab, jika kejujuran tidak ditegakkan maka pekerjaannya pun tidak bermakna (bermanfaat). Di sini dapat dilihat bahwa nilai Islam dan tradisi (Bahasa) Melayu sangat erat

kaitannya. Keduanya sangat menekankan pada arti penting dari sebuah kejujuran yang menjadi pilar keberhasilan.

Ketiga, memahami bahasa Melayu sebagai bahasa politik. Sekali lagi, sebuah bahasa tidak saja berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menjalin pembicaraan dengan orang lain. Akan tetapi, bahasa juga memiliki fungsi label atau penanda bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Bahasa Melayu Riau sebagai akar bahasa nusantara sangat politis. Sebab, bahasa ini selalu dijadikan acuan. Fakta bahwa Bahasa Melayu adalah asal-muasal Bahasa Indonesia tidak bisa terbantahkan (Sukesti, 2015; Wuriyanto, 2015). Dalam praktiknya, Bahasa Melayu Riau terbagi menjadi dua dialek. Bahasa Melayu Riau dengan akhiran “e” dan bahasa dengan akhiran “o”. Dialek Bahasa Melayu sangat banyak, ada yang mengatakan 87 dialek yang tersebar di pulau Sumatera dan beberapa daerah lain. Setiap dialek dipraktikkan oleh kelompok masyarakat sendiri yang juga mengusung misi tertentu yang tidak hanya terbatas pada media komunikasi, tetapi juga untuk menunjukkan identitas diri dan daerah masing-masing.

Strategi Mempertahankan Identitas Melayu

Ancaman atas keterpinggiran bahkan kepunahan budaya Melayu direspons oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dengan melakukan berbagai adaptasi, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, Lembaga Adat Melayu (LAM) melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi Riau untuk menggalakkan budaya dan menggunakan identitas Melayu secara masif. Salah satu hasil dari kerjasama ini adalah penggunaan simbol Melayu dalam berbagai bangunan pemerintah dan kembali mengadopsi bentuk bangunan Melayu di zaman dahulu (Gambar 2). Meskipun bangunan saat ini lebih modern, namun tetap mengambil semangat bangunan Melayu kuno seperti yang tercermin pada atap perkantoran dan bangunan fasilitas umum lainnya. Simbolisasi identitas Melayu ditonjolkan dalam beragam bentuk selain bangunan, seperti pada pakaian resmi ketika menjamu tamu, dan sebagainya.

Masyarakat Melayu didominasi oleh Muslim. Bahkan, Melayu diidentikkan dengan Islam, dan demikian pula sebaliknya. Baik Islam maupun Melayu memiliki irisan yang tidak bisa dipilah dan dipisahkan. Hal ini dapat dilihat pada praktik-praktik sosial masyarakat Muslim yang sangat kental dengan budaya Melayu. Demikian pula sebaliknya, budaya masyarakat Melayu memiliki hubungan kuat dengan Islam, pengidentikan bukanlah hal baru. Di berbagai tempat juga dapat ditemukan demikian. Di tanah Bugis misalnya, klaim bahwa Bugis adalah Islam dan sebaliknya sangat kental bahkan hingga saat ini (Jubba et al, 2018; Jubba et al, 2019). Secara kebetulan, antara masyarakat Melayu Riau dan Bugis memiliki hubungan kultural yang kuat. Bahkan, sangat mudah menemukan keturunan Bugis di wilayah Riau hingga sekarang. Pengidentikan sebuah kelompok masyarakat atas agama tertentu juga terjadi misalnya pada masyarakat Dayak di Kalimantan. Dayak adalah Kristen, dan Kristen adalah Dayak. Jika seseorang berpindah agama misalnya, maka ia pun terkeluarkan secara kultural dari masyarakatnya. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa hubungan antara agama dengan budaya sulit dipisahkan.

Beberapa riset telah menyinggung bahwa hubungan Islam dengan Melayu sangat kuat dan sulit dipisahkan. Saat ini, dalam praktik sosial masyarakat Riau selalu dikembalikan acuannya pada Islam. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengidentikan tadi. Islam adalah ukuran nilai bagi sikap masyarakat Melayu. Terdapat perasaan yang membanggakan bagi masyarakat Melayu dengan identitas keislamannya. Kualitas Islam dalam aspek Melayu ditunjukkan oleh contoh seseorang yang keluar dari Islam, maka secara otomatis dianggap keluar dari Melayu itu sendiri. Hal yang sama juga berlaku ketika seseorang yang mengaku Islam sehingga secara umum masyarakat akan mengatakan orang tersebut telah menjadi Melayu.

Politik uniformitas di era Orde Baru sangat efektif menekan berbagai identitas lokal yang beragam. Selain Bahasa, pakaian juga menjadi perhatian rezim kala itu. Semua harus seragam, demikian prinsip sederhananya yang

dianut kala itu. Dampaknya adalah kebudayaan-kebudayaan lokal tergerus dan larut mengikuti budaya uniformitas tadi. Bahkan, ketika itu dominasi kultur di Indonesia sangat jawaisme. Pembangunan pun berpusat di Jawa sehingga daerah-daerah lain “terlupakan”. Pasca keruntuhan Orde Baru, terjadi gelombang baru yang mengusung kesamaan hak kultur anak bangsa. Berbagai identitas daerah muncul ke permukaan dan berusaha tampil dengan kekhasannya masing-masing. Penguatan identitas kedaerahan semakin mendapat ruang seiring dengan kebijakan desentralisasi. Kekuasaan tidak lagi tersentral di pusat, tetapi telah disebar ke daerah-daerah dengan Batasan-batasan tertentu. Di kalangan masyarakat Melayu, berbahasa Melayu merupakan sebuah kebanggaan dan sebagai bentuk upaya mengembalikan “marwah” budaya yang selama ini tenggelam. Melalui Bahasa Melayu pula, identitas kemelayuan seseorang dapat terlihat.



Gambar 1. Ajakan Pelestarian Bahasa Melayu

Sumber: Riautelevisi.com (2019).

Pada Gambar 1, terlihat jelas adanya keinginan semua pihak untuk kembali mengangkat Bahasa Melayu ke pentas yang lebih luas. Bahkan, bahasa Melayu, yang tidak lain adalah cikal-bakal bahasa Indonesia, selalu didengungkan. Selain bahasa, pemerintah daerah juga menggalakkan penggunaan busana Melayu pada hari-hari tertentu, misalnya pada Hari Ulang Tahun (HUT) daerah di mana seluruh pegawai diwajibkan mengenakan pakaian Melayu. Bagi kaum laki-laki memakai pakaian yang dikenal dengan *Baju Kurung Cekak Musang* sedangkan kaum wanita mengenakan pakaian

yang dikenal dengan *Baju Kurung Teluk Belanga*. Pakaian tersebut sangat khas dengan budaya Melayu dan dianggap sangat islami karena menutup aurat secara keseluruhan.

Secara kelembagaan, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam pelestarian identitas Melayu. Salah satu upaya adalah melakukan pekan adat dalam rangka menghidupkan kembali budaya Melayu yang mulai mengalami pergeseran.



Gambar 2. Bentuk Kegiatan Kerjasama Memperkuat Kebudayaan Melayu
Sumber: datariau.com (2019)

Pada Gambar 2, tampak kegiatan yang dilakukan selain memperingati hari jadi Lembaga Adat Riau (LAM) juga dirangkaikan dengan Pekan Adat dan Budaya Melayu. Hal ini dimaksudkan tidak saja menyelenggarakan kegiatan secara rutin, tetapi juga berupaya menghidupkan kembali semangat kemelayuan yang dihadapkan pada sejumlah tantangan saat ini, khususnya menyangkut keberlangsungan identitas Melayu di masa yang akan datang. Keberpihakan pemerintah daerah diperlukan untuk memberikan jaminan atas keterjagaan identitas Melayu. TH (35) mengungkapkan:

“Upaya penguatan identitas Melayu dapat dilakukan dengan peneguhan keberpihakan pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang identitas Melayu dalam Perda muatan lokal, membangun monumen Melayu dan mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam aktifitas masyarakat” (Wawancara, Desember 2020).

Keberpihakan mengenai pelestarian budaya Melayu juga sebaiknya didukung oleh praktik dalam kehidupan keseharian. EZ (33) mengungkapkan

bahwa kebijakan pemerintah daerah juga diikuti oleh penggunaan identitas Melayu dalam berbagai level, termasuk kaum muda pada berbagai kegiatan. Ia menyebutkan:

“Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar identitas Melayu tidak punah adalah mengenalkan adat dan budaya Melayu kepada masyarakat terutama kaum muda mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi melalui mata pelajaran ataupun mata kuliah. Kemudian mewajibkan untuk setiap kegiatan baik resmi ataupun tidak resmi menggunakan adat Melayu. Membentuk organisasi Melayu untuk kaum muda dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan seputar adat dan kebiasaan Melayu” (Wawancara, Oktober 2020).

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap perkembangan kebudayaan daerah, termasuk memberikan ruang yang lebih luas untuk diaktualisasikan melalui seperangkat kebijakan di satu sisi. Pada sisi lain, kebijakan pemerintah daerah diikuti oleh komitmen bersama masyarakat untuk melestarikan identitas Melayu secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Upaya mempertahankan identitas Melayu tidak saja dilakukan oleh pelaku budaya (masyarakat), tetapi juga stakeholder lain dalam hal ini pemerintah daerah. Keberadaan Lembaga Adat Melayu menjadi pertanda kehadiran budaya Melayu dalam berbagai momen. Apa yang dilakukan oleh lembaga adat, yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah menjadi titik terang atas masa depan kebudayaan Melayu secara luas. Lembaga Adat Melayu selain didedikasikan untuk melindungi dan memelihara tradisi Melayu, juga menjadi media yang menyambungkan budaya dengan negara. Adanya persepsi negatif mengenai budaya Melayu secara tidak langsung akan berhadapan dengan lembaga adat dan pemerintah daerah. Pada konteks inilah optimisme atas masa depan kebudayaan semakin terang. Berbagai upaya dilakukan hingga saat ini untuk mengubah persepsi tersebut melalui internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat Melayu Riau yang dilakukan melalui proyek ‘Melayunisasi’.

Konstruksi identitas Melayu Riau yang sangat kental dengan nilai-nilai

Islam menjadi titik kompromi. Baik Melayu maupun Islam memiliki domain masing-masing yang pada akhirnya dapat dipertemukan dalam berbagai arena dan kondisi seperti yang dapat ditemukan pada desain bangunan di tanah Melayu. Apa yang terjadi selama ini, khususnya menyangkut bagaimana identitas Melayu Riau ditempatkan pada posisi yang berintegritas merupakan langkah yang strategis untuk mengangkat kearifan lokal agar semakin mengemuka. Studi ini, selain memperlihatkan adanya upaya dan komitmen kuat dari semua kalangan dalam mengkonstruksi identitas budaya bangsa yang mulai pudar, juga menjadi indikator kuat atas adanya semangat nasionalisme yang tidak pernah padam di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya dilakukan terobosan-terobosan baru yang lebih progresif untuk mempertahankan nilai-nilai lokal yang sejauh ini mengalami ancaman kepunahan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan budaya daerah yang telah terbukti menjadi salah satu pilar penting terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang semakin terbuka dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rani, M. (2005). Antara Islam dan Hinduisme di Alam Melayu: Beberapa catatan pengkaji Barat. *SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu*, 23, 67-82.
- Abdullah, A. (2017). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif. *Jurnal An-Nida': Pemikiran Islam*, 41(2), 202-212.
- Abdullah, I. (2017). Glokalisasi Identitas Melayu: Potensi dan Tantangan Budaya dalam Reproduksi Kemelayuan. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 6 (2), 1-7.
- Abdullah, M. A., & Abdul Fattah, R. A. (2013). "Diaspora Rumpun Melayu di Muar, Johor, Malaysia", *Seminar Diaspora dan Deklarasi Daerah Kembar Siak dengan Dungun*, Terengganu, Siak, 15-17 November 2013.
- Affandi, S. A. (2018). "Kapabilitas Lembaga Adat Melayu Riau dalam Mewujudkan Visi Misi Riau 2020". *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY.

- Ahmad, A. S. (1979). *Sulalatus Salatin Sejarah Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Alfarabi, Antar Venus, N. A. S. & N. E. S. (2019). Elite Lokal dan Upaya Pembentukan Wajah Baru Identitas Melayu di Indonesia Pascareformasi. *Akademika: Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities*, 89 (3), 143–154.
- Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri Syafirah, N. E. S. (2019). Media Identitas Melayu Pascareformasi di Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6 (1), 21–31.
- Alfarabi. (2019). Simbol Eksistensi Identitas Etnik Melayu Riau di Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 67–77.
- Arifin, Azmi. (2012). Syed Hussein Alatas: Pemikiran Kolonial dan Gagasan 'Feudalisme Melayu'. *Jurnal Akademika*, 82 (1), 21-30.
- Asrinaldi, A. (2018). Dimensi Kekuasaan Penghulu Adat Melayu Riau dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal. *Jantro: Jurnal Antropologi Isu-isu Sosial Budaya*, 20(1), 57–69.
- Effendy, T. (2013). *Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Syair, dan Ungkapan*. Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation.
- Erman, M. A. (2018). Politik Identitas dan Negara Bangsa di Riau. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17 (1), 1–13.
- Habibi, M. (2017). Analisis Politik Identitas di Indonesia. (March), 1–22. <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.16590.66887>.
- Hanafiah, Muhammad Nur Al-Hakim Mohamad dan Mohd Firdaus Che Yaacob. (2020). " Nilai-nilai Islam dan Pembentukan Akhlak dalam Cerita Rakyat Melayu", *International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL)*, 10 (2), 48 – 56.
- Hemay, I., & Munandar, A. (2015). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. *Politik: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1737–1748.
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jaya, A. C. (2019). Konsep Nation-State Dalam Pemikiran Ideologi Politik Melayu Islam Pada Abad Ke-19 M (Studi Pemikiran Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854)). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15 (1), 1-25.

- Jubba, H., Pabbajah, M., Prasodjo, Z. H., & Qodir, Z. (2019). The future relations between the majority and minority religious groups, viewed from Indonesian contemporary perspective: A case study of the coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita, South Sulawesi. *International Journal of Islamic Thought*, 16(2), 13-23. <https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.002>
- Jubba, H., Rustan, A. S., & Juhansar, J. (2018). Kompromi Islam dan Adat pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 2 (2), 137-148. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2865>
- M. Zainuddin. (2018). Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Melestarikan Wisata Budaya Di Provinsi Riau. *Jurnal Agregasi*, 6(1), 91–107.
- Mashitah, Sulaiman. (2013). Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Malaysia: Suatu Kajian Eksploratori. *Proceeding of the International Conference on Social Science Research*.
- Nordin, M. (2017). *Kesultanan Melayu Melaka*. Kuala Lumpur: University Malaya.
- Prayetno. (2016). Menguji Hak Politik dalam Kontestasi Politik; Analisis terhadap Politik Identitas Etnis di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. 7 (2), 39–54.
- Putra, B. A. (2016). Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. *Humanika*, 1 (1), 1-12.
- Reid, Anthony. (2001). Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities. *Journal of Southeast Asian Studies*, 32 (4), 295-313.
- Ris'an Rusli, Y. (2018). Relevansi Dan Kontinuitas Pemikiran Islam Klasik dalam Intelektualisme Islam Melayu Nusantara. 2 (November), 187–197. <https://Doi.Org/10.15575/Jw.V3i2.3582>
- Rozi, S. (2018). Nasionalisme Demokratisasi dan Sentimen Primordialisme Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 75-84.
- Salam, N. E. (2017). Penetapan Simbol Arsitektur Perumahan Masyarakat Riau (Selembayung) Sebagai Strategi dalam Melestarikan Budaya. Prosiding 2th Celscitech-UMRI, 2, 29–37.
- Salim, K. (2015). Politik Identitas di Maluku Utara. *Politik: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 11(2), 1667–1678.

- Samin, S. M. (2015). Kerajaan dan Kesultanan Dunia Melayu: kasus Sumatra dan Semenanjung Malaysia. *Crikestra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4 (1), 62-83.
- Sanusi, I. (2017). Globalisasi Melayu: Peluang dan Tantangan Membangun Identitas Melayu dalam Konteks Modernitas. *Khazanah*, 1(1), 39-57.
- Sanusi, I. (2017). Globalisasi Melayu: Peluang dan Tantangan Membangun Identitas Melayu dalam Konteks Modernitas. *Tarbawiyah, Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 01(1), 39-57.
- Stapa, Z., & Shahrudin, Noranizah Yusuf, A. F. (2012). Islam Asas Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu-Muslim. *Hadhari: An International Journal*, Special Edition, 129-141.
- Syu'ib. (2017). Lembaga Adat Melayu Riau Periode 2012-2017 dalam Menegakkan Identitas Kolektif Masyarakat Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fisipol Universitas Riau*, 4 (2), 1-16.
- Tamuri, Ab. Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) *Nilai, amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam selepas penjajahan Barat hingga kini*. Peradaban Arab-Islam dan Masyarakat Melayu. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 35-57.
- Ulum, B., Jannah, S. R., & Arifullah, M. (2017). Hegemoni Sosial dan Politik Identitas Putra Daerah Jambi, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7 (1), 225-249.
- Venus, A., Syafirah, N. A., & Salam, N. E. (2019). Stereotip, Melayu, Etnik, Reformasi, Pendatang. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 3(2), 131-141.
- Zainuri, M. (2017). *Budaya Melayu Berintegritas*. D. S. Suparman (Ed.), *Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas*, 1-17. Kota Pekanbaru Provinsi Riau: Pemerintah Provinsi Riau.
- Zakaria, I. (2012). Islam dan Falsafahnya dalam Kebudayaan. *Journal Hadhari*, Special Edition, 91-108.
- Zed, M. (2015). Hubungan Indonesia-Malaysia: Perspektif Budaya dan Keserumpunan Melayu Nusantara. *Tingkap: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan Ekonomi*, 11 (2), 140-159.